

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Diskursus seputar tema relasi demokrasi dan kapitalisme sebagai sistem politik dan ekonomi yang dominan dan dianggap paling penting di dunia sebagai pilar utama tatanan dunia modern saat ini, kerap kali memunculkan pertanyaan dan debat yang menarik. Pertanyaan seputar esensi pembangunan dan kesetaraan ekonomi; perdebatan tentang peran pemerintah dan kebebasan individu; isu tentang kekuatan korporasi dan lingkungan berkelanjutan; argumentasi tentang partisipasi politik dan hak asasi manusia; dominasi media dan opini publik; serta isu-isu lain sebagai bias dari persoalan-persoalan pokok di atas, mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang luas dalam relasi antara kapitalisme dan demokrasi. Pertanyaan yang terus-menerus bergulir dan perdebatan yang tidak pernah tuntas di hadapan tatanan politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks, dinamis dan cukup sulit diprediksi, juga dipandang sebagai representasi kehendak dan usaha masyarakat global untuk menemukan titik equilibrium di dalam tatanan kehidupan bersama.

Diskursus di ruang publik dan kajian akademis yang kritis-komprehensif lintas ilmudi dalam persoalan-persoalan di atas, dengan demikian, selalu dianggap signifikan dan relevan terutama dalam meneropong praksis kapitalisme dan demokrasi sebagai pilar atau penopang tatanan dunia modern. Usaha ini menysar beberapa tujuan, yakni: mengidentifikasi persoalan mendasar; membuka pintu bagi eksplorasi terhadap berbagai perspektif; hingga menawarkan opsi-opsi inovatif dan solutif terhadap personal-persoalan fundamental dan krusial di tengah aneka tantangan, dilema, dan dinamika yang menyertainya. Bagaimanapun, demokrasi dan kapitalisme diakui telah berkontribusi terhadap peradaban manusia dalam berbagai dimensi kehidupan. Bahkan, berbagai negara mengkonstruksi

kebijakan, meregulasi ekonomi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan kapitalisme, agar demokrasi dapat bersinergi dengan kapitalisme sehingga mampu menjalankan fungsinya. Berdasarkan telaah historis, demokrasi dan kapitalisme selalu secara konsisten mempertahankan relevansinya selama berabad-abad dengan kapabilitasnya sendiri, dan layak disebut sebagai sistem yang paling kuat, berpengaruh, dan berjaya dalam beberapa abad terakhir.

Dalam perkembangannya, kapitalisme dan demokrasi menjadi dasar dari kebanyakan negara di dunia sehingga kedua sistem ini semakin dominan dan populer terutama setelah Perang Dunia II sebagai periode puncaknya.<sup>1</sup> Bahkan, dapat dikatakan, sejak komunisme mengalami keruntuhan signifikan pada akhir abad ke-20, demokrasi, meminjam bahasa Muthar Haboddin, menjadi ideologi tunggal tanpa tandingan<sup>2</sup>. Oleh Francis Fukuyama, peristiwa keruntuhan komunisme dan berakhirnya Perang Dingin menandai kemenangan demokrasi liberal atas ideologi tandingannya seperti monarki hereditas, fasisme, dan komunisme. Kemenangan itu dideklarasikan oleh Fukuyama dalam artikelnya *The End of History* yang diterbitkan oleh Jurnal *The National Interest* pada musim panas tahun 1989 dengan memaparkan tesis “akhir sejarah”, yang berarti berakhirnya evolusi ideologis umat manusia dan universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan manusia.<sup>3</sup>

Dengan kemunculan tesis Fukuyama ini, yang melukiskan masa berakhirnya Perang Dingin sebagai kemenangan demokrasi liberal yang didukung oleh kapitalisme global pada sisi lain,<sup>4</sup> orang kemudian mempercayai demokrasi liberal sebagai satu-satunya alternatif yang lebih efektif sebagai bentuk pemerintahan daripada bentuk-bentuk lain yang pernah ada. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan William, dunia baru yang ditandai oleh “berakhirnya

---

<sup>1</sup> Bdk. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 105.

<sup>2</sup> Muthar Haboddin dan Muh Arjul, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), hlm. 249.

<sup>3</sup> Francis Fukuyama, “The End of History?”, *Jurnal The National Interest*, No. 16 (Summer, 1989), hlm. 1. Bdk. Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York: The Free Press - A Division of Macmillan, Inc., 1992), hlm. Xi.

<sup>4</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, *op.cit.*, hlm. 32-33.

sejarah” dapat dicirikan dengan luasnya pencapaian konsensus demokrasi liberal dan perkembangan pasar.<sup>5</sup>

Sepanjang sejarah, negara-negara yang mengadopsi demokrasi terus meningkat. Peningkatan jumlah negara di dunia, tidak hanya terjadi di negara-negara Barat, tetapi juga di negara-negara berkembang.<sup>6</sup> Masing-masing negaramempunyai jalan dan tahapan yang beragam dan kompleks dalam periode transisi menuju demokrasi. Hal ini bergantung pada sumber daya kultural<sup>7</sup> atau basis - seperti kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya – masing-masing negara yang tentu berbeda.<sup>8</sup> Pertimbangan terhadap prakondisi atau basis yang ada dalam suatu negara sangat menentukan hasil dan kualitas demokrasi. Dapat dikatakan, prakondisi yang kondusif sangat mungkin dapat mendukung terwujudnya demokrasi. Sebaliknya, prakondisi yang tidak kondusif justru dapat menghalangi terwujudnya demokrasi. Oleh karena perbedaan prakondisi itu, maka tidak ada satu jalan atau pola umum menuju demokratisasi, paling tidak yang spesifik dan diciptakan untuk semua zaman yang berlaku untuk semua negara. Bahkan di Barat pun, sebagai wadah mekarnya demokrasi modern, jalan menuju demokrasi begitu beragam.

Setelah melewati proses yang kompleks dan beragam dalam periode transisi menuju demokrasi, banyak negara demokrasi di berbagai belahan dunia juga mengalami pasang surut dalam menerapkan demokrasi. Fenomena pasang surut itu terkonfirmasi dalam ulasan tentang peristiwa gelombang demokratisasi, sebagaimana yang digambarkan Huntington melalui *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Huntington mengklasifikasi gelombang demokratisasi ke dalam tiga periode waktu. Gelombang pertama dimulai dari tahun 1828 sampai 1926; gelombang kedua dimulai dari tahun 1943 sampai 1962; dan gelombang ketiga dimulai dari tahun 1974 sampai 1990-an.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Robert William Hefner, *Islam, Pasar, Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme, dan Demokras*, penerj. Amiruddin Asyhabudin (Yogyakarta: Ikis, 2013), hlm. 142.

<sup>6</sup> Bdk. Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), hlm. 262-263.

<sup>7</sup> Robert William Hefner, *op. cit.*, hlm. xvii.

<sup>8</sup> Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, penerj. I. Made Krisna (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014 ), hlm. xvi.

<sup>9</sup> Samuel P. Huntington, *op. cit.*, hlm. 16.

Dalam studi empirisnya, Huntington menemukan gerakan arus balik dari gelombang demokratisasi itu, yakni kembalinya negara-negara demokrasi menjadi non-demokrasi atau otoriter.<sup>10</sup> Sementara itu, gelombang keempat demokrasi terjadi pada tahun 2010-an dan merujuk pada masuknya negara-negara Arab dan berpenduduk mayoritas Muslim yang tidak tersentuh oleh gelombang ketiga demokrasi ke dalam orbit demokrasi. Howard dan Hussain menyebut gelombang keempat demokrasi itu sebagai gelombang *Arab Spring*.<sup>11</sup>

Pada abad ke-21 ini mayoritas negara di dunia telah mengadopsi demokrasi, baik sebagai sistem politik pemerintahan maupun sebagai tata nilai kehidupan sosial. Berdasarkan laporan riset *Democracy Index 2023* yang dirilis *Economist Intelligence Unit* (EIU), dari 167 negara yang dikaji terdapat 74 negara atau 44,3% yang tergolong sebagai negara demokratis, yang terdiri dari 24 negara yang tergolong demokrasi penuh (*full democracies*) dan 50 negara tergolong demokrasi cacat (*flawed democracies*). Sementara itu, 34 atau 20,4% negara tergolong sebagai rezim hibrida (*hybrid regimes*) dan 59 atau 35,3% negara tergolong sebagai rezim otoriter (*authoritarian regimes*).<sup>12</sup>

Sebagaimana demokrasi, kapitalisme yang dianggap kompatibel dan memiliki potensi bersinergi dengan demokrasi, juga mengalami fase kebangkitan yang serupa, terutama selama Revolusi Industri pada pertengahan abad ke-18. Jejak kelahiran kapitalisme sampai pada priode kebangkitannya hampir serupa dengan demokrasi, yakni lahir dari relasi yang penuh kontradiksi internal dari bentuk-bentuk sistem sebelumnya. Tinjauan historis memperlihatkan kapitalisme lahir pasca runtuhnya feodalisme yang cukup lama berkembang dan mendominasi di masyarakat Eropa dari sekitar tahun 900 hingga tahun 1400. Dinamika internal dalam feodalisme yang berujung pada hilangnya soliditas dan kemampuan artikulasinya dalam pengorganisasian sosial dan ekonomi masyarakat, memaksa dan mendesak perubahan sekaligus penerimaan dalam corak produksi baru,

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>11</sup>Hakimul Ikhwan, "Menyemai Demokrasi Agonistic di Indonesia", dalam Ferdi Jehalut, *Paradoks Demokrasi: Telaah Analitis dan Kritis atas Pemikiran Chantal Mouffe* (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2020), hlm.123.

<sup>12</sup>The Economist, "Democracy Index", [https://en.m.wikipedia.org/wiki/The\\_Economist\\_Democracy\\_Index/](https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Economist_Democracy_Index/), diakses pada 3 Januari 2024.

terutama ketika para tuan tanah segera menerima hubungan produksi yang baru dan memungut teknologi dan organisasi produksi baru sebagai opsi tunggal demi terwujudnya efisiensi produksi.<sup>13</sup> Dengan demikian, jejak historis ini membenarkan bawah formasi sosial feodalisme Abad Pertengahan justru menjadi landasan dan titik berangkat bagi perkembangan kapitalisme.

Setelah melalui periode dan dinamika yang panjang, pada abad ke-19 dan ke-20, kapitalisme menyebar ke seluruh dunia, terutama melalui proses globalisasi pada beberapa dekade terakhir, dan bersamaan dengan itu mengubah tatanan ekonomi global. Dalam perkembangannya, kapitalisme menjadi sistem yang dominan di dunia pada abad ke-20 dan berkuasa selama kurang lebih 200 tahun.<sup>14</sup> Tidak hanya itu, tren perkembangan dan kemajuan peradaban hingga saat ini masih diperkokoh dalam kerangka kerja ekonomi kapitalistik dalam cara-cara yang paling adaptif dan inovatif sehingga hegemoni kapitalisme itu cukup sulit untuk dikatakan segera berakhir. Terlepas dari kelemahan dan ketidaksukaan pada kapitalisme dalam berbagai bentuk kritik, harus diakui, sebagaimana dikatakan Harari, bahwa masyarakat dunia tidak bisa hidup tanpanya.<sup>15</sup>

Hegemoni kapitalisme dapat dikaitkan dengan dua pemikiran yang cukup mendominasi kehidupan manusia masa kini, yang kemudian keduanya menjadi rangka dasar kapitalisme, yakni individualisme dan liberalisme. Kedua pemikiran atau gagasan ini lahir secara berurutan dan sekuensial. Adam Smith sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori kapitalisme modern, dapat menjadi rujukan dalam interaksi antara kapitalisme dan liberalisme. Smith dikenal sebagai tokoh utama dalam ekonomi klasik liberal, yang menempati generasi kedua dalam revolusi ide liberalisme. Karena itu pengembangan teori kapitalisme modern mendapatkan fondasinya pada konsep-konsep ekonomi liberal klasik itu, yakni penekanan utama pada pentingnya pasar bebas, persaingan, dan kebebasan

---

<sup>13</sup> Arianto Sangaji, *Transisi dari Feodalisme ke Kapitalisme*(Jakarta: IndoProgress, 2019), hlm. xv-xvi.

<sup>14</sup> Robert Heilbroner, *The Worldly Philosophers: The Lives, Times And Ideas Of The Great Economic Thinkers* (New York: Touchstone, 1999), hlm. 17.

<sup>15</sup> Yuval Noah Harari, *Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya*, penerj. Yanto Mushtofa (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2017), hlm. 396.

individu dalam mengatur ekonomi.<sup>16</sup> Berdasarkan komponen-komponen itu, kapitalisme dianggap mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran Adam Smith melalui bukunya "*The Wealth of Nations*", sebagaimana yang diuraikan Edwin, bahwa kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang paling efisien dan produktif, dan bahwa ia akan mengarah pada inovasi, efisiensi dan peningkatan kesejahteraan bagi semua orang.<sup>17</sup> Pengakuan yang sama berasal dari Milton Friedman melalui bukunya "*Capitalism and Freedom*", bahwa terdapat kontribusi kapitalisme terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, Friedman mengatakan bahwa pasar bebas dan kebebasan ekonomi adalah landasan penting bagi kebebasan politik dan peningkatan kesejahteraan sosial.<sup>18</sup>

Pengakuan teoritis tentang korelasi kebebasan ekonomi dalam kapitalisme dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia mendapatkan bukti empiris dalam beberapa studi terkait indeks kebebasan pada negara-negara ekonomi kapitalistik. Salah satu studi mengenai indeks itu dilakukan oleh *Heritage foundation*, suatu lembaga yang mengukur tingkat kebebasan ekonomi di negara-negara di seluruh dunia, yang sejak pemeringkatannya pada tahun 1995 menyatakan bahwa kebebasan ekonomi di seluruh dunia secara umum telah meningkat. Sebelum terjadinya Covid-19, guncangan ekonomi susulan, dan invasi Rusia ke Ukraina, para peneliti *Heritage Foundation* mengklaim bahwa rata-rata skor kebebasan ekonomi global berada pada titik tertinggi dalam sejarah indeks tersebut. Pada tahun 2023, sebagaimana yang dilaporkan *Global Finance, Heritage Foundation* melakukan pemeringkatan dan pengelompokan kebebasan ekonomi berdasarkan negara (*Economic Freedom by Country*) dengan hasil sebagai berikut: hanya 4 negara – turun dari 7 negara pada laporan edisi sebelumnya – yang dianggap bebas secara ekonomi (*free*); 23 negara diberi peringkat sebagian besar bebas (*mostly free*); 56 negara dianggap

---

<sup>16</sup> Adam Smith, *The Wealth of Nations*, ed. Edwin Cannan (London: Penguin Classics, 2003), hlm. 594-595 dan 697.

<sup>17</sup> Adam Smith, *ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>18</sup> Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* (Chicago: University of Chicago Press, 1962), hlm. 12-13.

cukup bebas (*moderately free*); 65 negara dianggap sebagian besar tidak bebas (*mostly unfree*); dan 28 negara dalam kategori tertindas secara ekonomi (*repressed*).<sup>19</sup> Laporan ini memperlihatkan kebanyakan negara-negara di dunia berada dalam status cukup bebas, dan karenanya terdapat potensi untuk mencapai tingkat kesejahteraan global, dengan menciptakan kemakmuran dan pertumbuhan, meningkatkan standar hidup, merata usia harapan hidup dan kesetaraan, sesuai dengan artikulasi kebebasan dan pengorganisasian ekonomi melalui kerangka kerja yang tepat cita-cita dan kondisi masing-masing negara. Dalam data statistik yang mengaitkan relasi kebebasan dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dikatakan Johan Norberg, terdapat 20 negara, yang secara ekonomi tergolong paling liberal di dunia, mempunyai PDB per kapita 29 kali lebih besar daripada 20 negara yang secara ekonomi tidak liberal.<sup>20</sup>

Laporan riset *Democracy Index 2023* oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU) dan *Economic Freedom by Country 2023* oleh *Heritage foundation* yang telah dipaparkan di atas sampai pada kesimpulan bahwa demokrasi dan kapitalisme merupakan model yang diterima oleh sebagian populasi global dengan tingkat kepercayaan cukup tinggi. Kapitalisme dan demokrasi yang semula berkembang bersama-sama di banyak negara Barat - bagian dunia yang selama beberapa abad karena telah menerapkan kapitalisme dalam satu bentuk tertentu hingga negara-negara Barat itu menjadi “bagian dunia yang makmur”,<sup>21</sup> seiring berjalanya waktu, keduanya menjadi pilihan banyak negaradi dunia. Meskipun hubungan antara kapitalisme dan demokrasi mengandung dinamika dan kompleksitas, dan karena itu telah mengalami evolusi dan adaptasi sepanjang sejarah<sup>22</sup> dan mempengaruhi konstruksi wajah demokrasi dan kapitalisme di berbagai negara sepanjang waktu, keduanya masih terus menjadi tujuan bagi banyak negara di dunia. Hal ini tak lepas dari kemampuannya dalam memberikan sejumlah keuntungan bagi masyarakat.

---

<sup>19</sup> Global Finance, “Economic Freedom by Country 2023”, <https://gfmag.com/data/economic-freedom-by-country/>, diakses pada 5 Januari 2024.

<sup>20</sup> Bdk. Johan Norberg, *Membela Kapitalisme Global*, penerj. Arpani dan Sukasah Syahdan (Jakarta: The Freedom Institute, 2001), hlm. 168-189.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>22</sup> Bdk. Robert Bartley dkk., *Demokrasi dan Kapitalisme*, penerj. Hendro Prasetyo (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1994), hlm. 1.

Kemampuan atau kapabilitas kapitalisme dan demokrasi dalam memberikan sejumlah keuntungan bagi masyarakat pada akhirnya mengafirmasi kompatibilitas relasi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan manusia. Sebagaimana klaim ‘akhir sejarah’ dari Fukuyama, demokrasi dan kapitalisme kemudian saling membutuhkan dan saling melengkapi serta bersinergi dalam mencapai ideal dan tujuannya. Demokrasi, yang mengedepankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik, dianggap membutuhkan kapitalisme yang didasarkan pada prinsip kepemilikan pribadi atau swasta dan pasar bebas dalam ekonomi. Kebutuhan demokrasi akan kapitalisme didasarkan pada aspek fungsional demokrasi sebagai sistem politik. Dalam hal ini, kapitalisme menyediakan langkah-langkah minimal dengan memberikan dasar material bagi demokrasi sehingga menciptakan masyarakat yang makmur dimana rakyat memiliki sumber daya untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sebaliknya, jika terjadi kemiskinan material, demokrasi menjadi sulit, sebab tidak mungkin kaum miskin dapat menikmati hak-hak politiknya secara penuh di dalam kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi yang tajam.<sup>23</sup> Melalui kerangka konseptual ini, banyak negara di dunia telah membangun, meratifikasi, dan menganut kapitalisme dalam demokrasi. Ada keyakinan bahwa tidak ada masyarakat yang berhasil memperoleh dan mempertahankan demokrasi tanpa terlebih dahulu memperoleh kebebasan ekonomi. Artinya kapitalisme penting dalam upaya mencapai kebebasan politik.

Sementara itu, kapitalisme membutuhkan dan mendukung demokrasi untuk bertahan. Kapitalisme memerlukan demokrasi paling tidak untuk mencapai tingkat kemandirian tertentu karena demokrasi menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk kebebasan individu dan kebebasan ekonomi. Terdapat iklim kebebasan dalam demokrasi sebagai aktualisasi visi demokrasi dalam menjamin kebebasan individu. Ini berarti kapitalisme menolak pembatasan kebebasan dalam aneka bentuk determinasi yang dominan terhadap aktivitas ekonomi, pemerintahan yang diktator, dan lain sebagainya, sebagaimana yang diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri.<sup>24</sup> Mengutip Johan Norberg, dalam

---

<sup>23</sup> Georg Sorensen, *op. cit.*, hlm. 16 dan 24.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 16 dan 21.



bukunya *Membela Kapitalisme Global*, kapitalisme merupakan kebebasan bagi individu-individu untuk membuat keputusan dan menentukan pilihan sendiri, bukan segala rencana dan keputusan yang digagas dari atas. Bahwasannya, dalam kapitalisme, kreativitas manusia tidak dapat disentralisir, justru harus dikembangkan dengan menyediakan kebebasan kepada warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri sehingga dapat berkarya, berpikir, dan bekerja. Setiap orang, termasuk orang-orang miskin, memiliki hak untuk melaksanakan semua itu, sehingga mampu menciptakan kekayaan dan peluang-peluang yang fantastis di dalam kehidupannya.<sup>25</sup> Pada akhirnya, kapitalisme sebagai ekonomi pasar liberal dalam tataran perorganisasian ekonomi ini dapat menciptakan kemakmuran, terutama ketika masyarakat diberi kebebasan sekaligus insentif untuk mencipta, memproduksi dan menjual barang dan jasa, atau sumber daya lainnya. Berdasarkan relasi ini, demokrasi dan kapitalisme sesungguhnya adalah dua entitas yang saling terkait dan saling mendukung,<sup>26</sup> dan bahwa demokrasi diperlukan untuk memastikan kapitalisme berjalan secara adil dan merata.<sup>27</sup> Sementara itu, kapitalisme memperoleh kerangka terbaik bagi operasi pasar bebas di alam demokrasi.

Dalam tinjauan historis, banyak negara telah mengadopsi dan mengkombinasi kedua sistem ini dalam mencapai tujuan fundamental politik dan bernegara, yakni pertumbuhan (*growth*) dan kesejahteraan (*welfare*). Sebuah studi empiris dilakukan oleh *The World Bank* pada tahun 2019 memperlihatkan bahwa negara-negara yang memiliki demokrasi dan kapitalisme memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 2,5% lebih tinggi daripada negara-negara yang tidak memiliki kedua sistem tersebut. Tidak hanya itu, negara-negara itu juga memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi,

---

<sup>25</sup> Johan Norberg, *op.cit.*, hlm. viii.

<sup>26</sup> Irfan Afifi, *Demokrasi dan Kapitalisme: Teori dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2023), hlm. 1.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

tingkat pengangguran yang lebih rendah, dan tingkat inflasi yang lebih rendah daripada negara-negara yang tidak memiliki kedua sistem tersebut.<sup>28</sup>

Sementara itu, sebuah studi yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* pada tahun 2018 terhadap tingkat kesejahteraan, menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki demokrasi dan kapitalisme memiliki tingkat kesejahteraan yang rata-rata lebih tinggi daripada negara-negara yang tidak memiliki kedua sistem tersebut. Hal ini tampak dalam tingkat harapan hidup yang lebih tinggi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki kedua sistem tersebut.<sup>29</sup> Lebih lanjut, sebagaimana yang diuraikan John Norberg dalam bukunya *Membela Kapitalisme Global*, bahwa kebebasan dan pasar yang terbuka dalam kapitalisme dapat memperbaiki kualitas hidup manusia dari kondisi pra-kapitalistik. Perubahan atau perbaikan itu berupa: peningkatan pendapatan rata-rata penduduk, termasuk penduduk miskin dunia selama kurun waktu 1965-1998 yang disebabkan oleh konsumsi dunia dan industrialisasi di AS dan Eropa;<sup>30</sup> penurunan jumlah penduduk dalam kategori kemiskinan absolut yang telah berkurang akibat pertumbuhan ekonomi<sup>31</sup>; perbaikan kondisi kemanusiaan yang tercermin dalam pertumbuhan pesat tingkat harapan hidup rata-rata di dunia yakni 9 dari 10 orang di seluruh dunia kini dapat berharap hidup hingga lebih 60 tahun, yang berarti dua kali lipat dari tingkat harapan hidup rata-rata manusia hanya seratus tahun sebelumnya<sup>32</sup>; penurunan drastis angka kematian bayi di negara-negara berkembang sebagai indikator yang paling handal dan paling dapat menjelaskan kondisi hidup masyarakat miskin<sup>33</sup>; dan pengurangan jumlah penduduk negara berkembang penderita malnutrisi yang berkurang setiap tahun oleh kejayaan “revolusi hijau” yakni produktivitas bahan

---

<sup>28</sup> The World Bank, “Democracy and Growth: The Role of Institutions,” *Open Knowledge Repository, World Bank*, 10 Januari 2019. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32153> diakses pada 14 Juli 2023.

<sup>29</sup> The Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2018” 2018 <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2018/>, diakses pada 23 Mei 2023.

<sup>30</sup> John Norberg, *op. cit.*, hlm. 8.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>33</sup> *Ibid.*

pangan berdaya tahan tinggi yang telah dikembangkan, dan pada saat yang sama, metode-metode penyemaian, irigasi, pemupukan dan panen meningkat drastis.<sup>34</sup>

Selain pada pertumbuhan dan kesejahteraan yang digolong sebagai konsekuensi domestik demokrasi dan kapitalisme, demokrasi dan kapitalisme juga memiliki konsekuensi internasional yakni tercapainya kerjasama dan perdamaian. Dapat dikatakan, demokrasi dan kapitalisme dipromosikan di dunia modern bertujuan untuk menciptakan peluang yang lebih banyak bagi kerja sama secara global yang memungkinkan lahirnya perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat kapitalis modern yang hidup dalam alam demokrasi percaya bahwa perdamaian membawa deviden yang unik karena roda investasi ekonomi kapitalistik berjalan sesuai tujuannya.<sup>35</sup> Hal ini bersentuhan dengan prinsip dan logika akumulasi dan profitabilitas dalam kapitalisme, bahwa investor atau kapitalis memiliki kecenderungan untuk mencari tempat yang lebih aman untuk berinvestasi atau berusaha, di mana kebijakan politik dan regulasi ekonomi dapat diprediksi dengan lebih baik. Jika demikian, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jangka panjang dapat diwujudkan.

Stabilitas politik dan perdamaian memang menjadi kunci untuk membangun tatanan global yang harmonis. Negara-negara demokrasi kapitalistik di dunia telah menunjukkan tingkat stabilitas yang memungkinkan terwujudnya kerjasama dan perdamaian itu. Studi yang diterbitkan oleh *Freedom House* pada tahun 2005 dengan judul "*Democracy and Capitalist Peace*" dengan menggunakan data dari 190 negara selama periode 1975-2003 menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki demokrasi dan kapitalisme memiliki tingkat stabilitas politik yang lebih tinggi, tingkat konflik yang lebih rendah, dan tingkat demokrasi yang lebih kuat daripada negara-negara yang tidak memiliki kedua sistem tersebut. Studi ini juga menemukan bahwa demokrasi dan kapitalisme memiliki efek yang saling memperkuat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Johan Noberg, *ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>35</sup> Bdk. Yuval Noah Harari, *Sapiens...*, *op.cit.*, hlm. 443-444.

<sup>36</sup> Bruce Russett, "Democracy and Capitalist Peace: The End of an Ideological Debate?" *Freedom House*, 2005. <https://freedomhouse.org/report/democracy-capitalist-peace-end-ideological-debate>, diakses pada 10 Maret 2023.

Melalui data-data ini, kapitalisme telah diakui sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, sementara demokrasi telah diakui sebagai pemberi kebebasan, serta pendorong kerjasama dan perdamaian internasional. Meskipun demikian, ada kekhawatiran dan sikap pesimistis yang terus berkembang, bahwa hubungan antara kapitalisme dan demokrasi akan menjadi renggang. Potensi kerenggangan itu terdeteksi dengan munculnya ketegangan atau kontradiksi yang melekat dalam praksis demokrasi dan kapitalisme yang membelenggu sebagian negara demokrasi.

Persoalan tersendiri yang dialami oleh beberapa negara demokrasi setelah melakukan transisi adalah sulitnya menerapkan nilai-nilai demokrasi. Persoalan korupsi, kemiskinan, dan konflik sosial ditengarai sebagai faktor penyebab dari sulitnya penerapan nilai-nilai itu. Deretan persoalan ini justru dapat mengancam nilai-nilai demokrasi. Di tengah meluasnya persoalan ini, kapitalisme justru dituduh sebagai dalang bagi munculnya persoalan-persoalan itu. Tuduhan yang paling kuat merujuk pada ketimpangan ekonomi, ketidaksetaraan politik dan kemungkinan pelanggaran kebebasan yang dapat merusak fondasi demokrasi, yang sudah dapat diamati di banyak negara demokrasi. Dengan demikian, alih-alih kapitalisme memberikan landasan material bagi partisipasi yang penuh dari warga demokrasi, kapitalisme juga membatasi demokrasi untuk mencapai potensinya secara penuh.

Begitupun sebaliknya, dalam beberapa hal, kebijakan-kebijakan tertentu dalam negara demokrasi dapat mengunci atau membatasi pergerakan kapitalisme. Pergerakan yang terbatas itu pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi ketika pemerintahan demokrasi diberi kekuatan untuk mengatur atau mengontrol kegiatan ekonomi tanpa menjamin kebebasan dalam ekonomi. Intervensi pemerintah yang terlalu dalam di berbagai sektor membuat pasar kehilangan kompetisi, inovasi, dan efisiensi yang menjadi urat nadi kapitalisme. Intervensi dan kebijakan seperti, kebijakan redistribusi pajak yang ketat; administrasi investasi dan birokrasi yang korup; pengambilan keputusan yang lambat dan cenderung birokratis; dan penegakan hukum yang tidak efektif; tidak merangsang investasi, inovasi, kreativitas dan pertumbuhan itu sendiri.

Melemahnya perekonomian kapitalistik justru membahayakan pertumbuhan ekonomi di negara demokrasi itu sendiri.

Maka, kebangkitan demokrasi dan kapitalisme tidak bisa dikatakan sebagai pertemuan yang sempurna, sebab kebangkitan itu tidak sepenuhnya mulus karena konflik yang muncul dari relasi keduanya menimbulkan berbagai masalah. Dinamika ini menunjukkan bahwa relasi antara demokrasi dan kapitalisme menjadi lebih kompleks dan penuh ketegangan daripada yang pertama kali terlihat. Terdapat hubungan yang kompleks antara kapitalisme dan demokrasi yang menciptakan dilema yang membingungkan. Dilema-dilema ini menunjukkan tantangan yang serius dalam menjaga keseimbangan antara kapitalisme dan demokrasi. Beberapa aspek-aspek utama seperti ketimpangan ekonomi, pengaruh korporasi, partisipasi politik, dan keberlanjutan lingkungan juga turut mempertegas dilema dalam relasi antara demokrasi dan kapitalisme.

Dalam konteks relasi antara demokrasi dan kapitalisme, dilema itu merujuk pada konflik atau ketegangan yang muncul antara prinsip-prinsip kedua sistem tersebut. Dilema-dilema berikut ini sebagai cakupan sejumlah masalah yang kompleks, menjadi fokus utama pembahasan ini, di antaranya:

*Pertama*, pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang mendorong persaingan dan keuntungan yang maksimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi seringkali mengingkari demokrasi karena menimbulkan ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Di satu sisi, demokrasi menekankan kesetaraan politik dan kebebasan individu, yang memungkinkan hak partisipasi politik sebagai roh demokrasi terjadi secara penuh dalam rangka mendorong demokrasi yang sehat.

*Kedua*, kekuasaan korporasi dan lemahnya partisipasi politik masyarakat. Di bawah sistem kapitalisme yang kuat, kekuatan ekonomi dan kepentingan bisnis pemilik modal dapat menguasai pemerintahan dan mempengaruhi proses politik, terutama pada kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan politik. Situasi ini membuat demokrasi menjadi cacat, sebab demokrasi membuka ruang dan

menjamin partisipasi politik seluruh masyarakat. Kekuasaan korporasi menggeserdaya pengaruh dari partisipasi politik masyarakat umum pada tingkat yang kecil yang menyebabkan tidak terakomodasinya kepentingan umum dalam kebijakan publik.

*Ketiga*, dominasi media dan opini publik yang termodifikasi. Kapitalisme juga mencakup media yang dikendalikan oleh sejumlah besar pemilik perusahaan besar. Kontrol informasi dan opini publik oleh kelompok-kelompok ekonomi tertentu dapat mempengaruhi proses demokratis dengan membatasi akses ke berbagai sudut pandang dan mendorong agenda yang sesuai dengan kepentingannya. Dalam hal ini opini publik menjadi tidak merepresentasi kehendak dan suara hati masyarakat, justru melayani kepentingan-kepentingan kelompok penguasa, dan ini berpengaruh pada kebijakan publik.

*Keempat*, pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Kapitalisme juga mengandung konflik antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Kapitalisme yang seringkali digerakan oleh motif pertumbuhan ekonomi dan profitabilitas yang tidak terbatas telah memicu suatu jenis pertumbuhan teknologi, produksi, dan konsumsi khusus yang buta terhadap permasalahan ekologi, sehingga kerusakan lingkungan selalu tak terelakan.

Deretan persoalan di atas menggambarkan dilema yang membingungkan dalam relasi kapitalisme dan demokrasi. Di satu sisi, relasi antara demokrasi dan kapitalisme yang konfliktual itu dikritik terus-menerus, bahkan dianggap inkompatibel. Namun, di sisi lain, berbagai kritik itu justru menjadi landasan bagi reformulasi dan adaptasi kapitalisme untuk menemukan opsi alternatif sebagai solusi bagi upaya pengentasan persoalan yang terjadi dalam ruang konfliktualnya.

Melalui skripsi ini, penulis berargumen bahwa dilema hubungan antara demokrasi dan kapitalisme dapat diselesaikan melalui konstruksi politik pembangunan yang mampu menghasilkan titik keseimbangan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Politik pembangunan sebagai sebuah konsep dalam ilmu politik berfokus pada pemerataan kesempatan, pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan,

dan penguatan institusi negara, dan aspek lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan memajukan ekonomi suatu negara atau daerah. Karena itu, tinjauan terhadap relasi demokrasi dan kapitalisme melalui politik pembangunan dapat memberikan gambaran yang diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara politik atau strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh negara, institusi atau partai politik dalam merencanakan, melaksanakan dan memelihara pembangunan. Gagasan mendasar dalam politik pembangunan dalam hal ini adalah bahwasannya negara memiliki peran vital dalam pembangunan.

Politik pembangunan di sini tentu bukan saja mengenai cara atau strategi yang hendak dicapai dalam pembangunan tetapi juga pemikiran atau ideologi yang termasuk dalam pembangunan sebagai strategi dan cara yang dijalankan. Dalam kaitan dengan demokrasi, pembangunan tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi pada politik itu sendiri, karena pembangunan juga dimaknai sebagai proses dalam demokrasi yang menekankan peran institusi dan partai politik. Sementara dalam konteks politik pembangunan, istilah pembangunan selalu berkaitan dengan usaha untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, serta meningkatkan daya saing suatu negara di tingkat global. Dengan demikian, pembangunan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi memang penting bagi suatu negara dan dianggap sebagai syarat utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan bersaing di tingkat global.

Dalam skripsi ini, penulis tidak hanya memberikan penekanan pada peran politik pembangunan sebagai pisau pembedah dalam mengelaborasi dan mengkritisi relasi antara kapitalisme dan demokrasi sebagai ideologi atau konsep pemerintahan, tetapi juga melakukan analisis komprehensif terhadap kerangka dan mekanisme pembangunan ekonomi kapitalis dalam negara demokrasi-kapitalisme selama ini yang melahirkan dilema. Ini berarti penulis tidak hanya mempertanyakan apa yang menjadi peran seharusnya (*proper role*) dari pemerintah, tetapi juga menyelidiki sejauh mana ideologi atau konsep yang mbingkai pembangunan itu menemukan keseimbangan dan tidak melahirkan kontradiksi yang dilematis secara terus-menerus.

Di bawah judul “**DILEMA RELASI ANTARA DEMOKRASI DAN KAPITALISME: TINJAUAN KRITIS-KOMPREHENSIF MELALUI PERSPEKTIF POLITIK PEMBANGUNAN**”, skripsi ini akan membedah relasi antara demokrasi dan kapitalisme melalui perspektif politik pembangunan dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih kritis dan komprehensif mengenai kompleksitas hubungan antara kapitalisme dan demokrasi, serta memberikan saran-saran kebijakan yang tepat dan langkah-langkah yang sesuai dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif serta tatanan sosial dan ekonomi yang seimbang. Bagi penulis, tulisan ini relevan, sebab, meskipun banyak penelitian atau kajian telah membahas relasi antara demokrasi dan kapitalisme, sebagian studi itu tampak kurang memperhatikan aspek politik pembangunan secara menyeluruh. Sebagian besar literatur yang ada memiliki tendensi untuk memisahkan analisis demokrasi dan kapitalisme dari konteks politik pembangunan, padahal relasi antara ketiganya sangat kompleks, dinamis, dan saling memengaruhi. Karena itu, tulisan ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan tinjauan kritis-komprehensif melalui politik pembangunan, yang menawarkan perspektif baru dalam memahami dinamika dan kompleksitas relasi antara demokrasi dan kapitalisme. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan berkontribusi penting dalam literatur yang ada.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan di atas, penulis pertama-tama akan menguraikan pengertian dan gambaran relasi antara kapitalisme, demokrasi dan politik pembangunan. Selanjutnya, penulis mengkaji relasi demokrasi dan kapitalisme dari aspek kompatibilitas dan sinergitas, serta mengelaborasi dilema relasi antara demokrasi dan kapitalisme secara komprehensif dalam konteks keduanya sebagai bagian dalam gagasan pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Pada bagian akhir, penulis memberikan kemungkinan kapitalisme dan demokrasi dapat mencapai keseimbangan dalam konteks menjaga nilai-nilai dari masing-masing, baik demokrasi maupun kapitalisme. Dengan cara-cara yang layak dan legal berdasarkan konsensus peradaban, tujuan dari masing-



masing sistem dapat terwujud. Beberapa pertanyaan untuk mengkonstruksi pembahasan di atas, antara lain: (1) Apa itu kapitalisme, demokrasi, dan politik pembangunan, dan seperti apa relasi ketiganya?(2) Apakah kapitalisme dan demokrasi sesungguhnya kompatibel dan karena itu dapat bersinergi sehingga layak disebut sebagai pasangan yang serasi?(3) Seperti apa dan dalam konteks apa dilema relasi antara demokrasi dan kapitalisme muncul? Atau relasi seperti apa antara demokrasi dan kapitalisme dalam pembangunan sehingga dikatakan sebagai dilema? (4) Bagaimana dan dalam cara apa politik pembangunan negara demokrasi-kapitalisme dapat mencapai titik keseimbangan, tanpa mengabaikan menghalangi pertumbuhan dan kesejahteraan itu sendiri? Atau bagaimana strategi politik pembangunan dapat mendamaikan dan memperkuat relasi antara demokrasi dan kapitalisme sehingga mencapai ideal yang sama, yakni pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum karya ilmiah ini bertujuan untuk: *pertama*, menjelaskan demokrasi dan kapitalisme sebagai suatu sistem politik dan ekonomi yang dominan di dunia saat ini. *Kedua*, mengkaji akar atau dasar relasi antara demokrasi dan kapitalisme yang menyebabkan keduanya dianggap sebagai pasangan serasi dan dapat bersinergi dalam menopang dan mengarahkan pembangunan suatu negara. *Ketiga*, mendeskripsikan dan mengelaborasi dilema dalam relasi antara demokrasi dan kapitalisme yang lahir dari ruang konflikual dan kontradiktif dalam hubungan antara demokrasi dan kapitalisme. *Keempat*, meninjau secara kritis dan komprehensif dilema relasi antara demokrasi dan kapitalisme melalui perspektif politik pembangunan sebagai implikasi kebijakan politik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. *Kelima*, mengeksplorasi berbagai perspektif dan ide-ide baru dalam pembangunan di negara demokrasi-kapitalisme sebagai dasar dalam menemukan opsi solutif di tengah tantangan, dinamika, dan kompleksitas relasi antara demokrasi dan kapitalisme yang melahirkan dilema.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Karya ilmiah ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Selain itu, tulisan ini dimaknai sebagai representasi minat dan dedikasi yang tinggi penulis di dalam usaha untuk memperluas wawasan penulis tentang relasi demokrasi, kapitalisme dan politik pembangunan dalam kerangka teoritis dan praktis. Penulis selanjutnya memandang karya ini sebagai wadah yang bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menulis sebagai aktivitas yang integral dari membaca itu sendiri. Akhirnya, penulis sebagai mahasiswa filsafat, menjadikan tulisan ini sebagai proyek filosofis-praktis yang menjangkar pada persoalan ekonomi-politik dan sosial sehingga tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu.

### **1.4 Metode Penulisan**

Dalam proses penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilalui dalam beberapa tahapan. *Pertama*, penulis membaca dan menganalisis teori-teori dan data-data dari berbagai literatur, baik literatur yang terdapat di perpustakaan, literatur pribadi, dan internet yang relevan atau berhubungan erat dengan tema yang digarap penulis. *Kedua*, penulis melakukan verifikasi ide dan data-data yang ada agar tulisan ini memberikan jaminan bagi relevansi tema dan aspek validitasnya. *Ketiga*, penulis juga melakukan diskusi dengan beberapa pihak sebagai usaha untuk memperluas wawasan, memperkaya perspektif dan khazanah pemahaman penulis tentang tema sehingga membangun arah atau gambaran penulisan karya ilmiah ini secara sistematis

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Karya ilmiah ini terdiri dari lima (5) bab. Bab I berisikan Pendahuluan. Pada bab ini, akan dijelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II berisikan tinjauan teoritis tentang tema kapitalisme, demokrasi, politik pembangunan dan relasinya

dalam mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan. Pada bab ini, akan diuraikan definisi, karakteristik dan sejarah serta gambaran relasi ketiganya secara umum.

Bab III berisikan kajian historis-komprehensif tentang kapitalisme yang embrionya dimulai dari zaman feodal kemudian berkembang menuju bentuknya yang mutakhir, yang disebut sebagai neoliberalisme. Begitu pula demokrasi, diulas mulai dari bentuk demokrasi langsung pada zaman Yunani Kuno hingga ke bentuk demokrasi politik modern, yang diwakili oleh demokrasi liberal sebagai bentuk sistem pemerintahan dan politik yang paling dominan. Bagian inti dari bab ini ialah kajian tentang dilema antara demokrasi dan kapitalisme dalam pertautannya sebagai dua komponen yang dipasang sebagai partner demi ideal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Namun, sebelum uraian itu, penulis terlebih dahulu mengkaji kompatibilitas kedua sistem dan mengukur sekaligus memberi dasar pertautan dan potensi sinergitas keduanya dalam mewujudkan ideal yang sama itu, yang tak lain adalah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, dan juga ditemukan potensi terciptanya perdamaian dan kerja sama.

Bab IV berisikan tinjauan kritis terhadap dilema relasi demokrasi dan kapitalisme melalui perspektif politik pembangunan. Pada bagian ini, penulis membahas demokrasi dan kapitalisme dalam kerangka relasi tiga pilar kekuasaan, yakni: negara, pasar, dan masyarakat sipil/madani. Sebagai solusi bagi persoalan relasi demokrasi dan kapitalisme yang dilematis ini, penulis menghadirkan, membaca, menjabarkan peranan *goodgovernance* dan *civilsociety* dalam konteks mengawasi dan memberi pengaruh atau daya agar pembangunan yang terjadi dalam ruang demokrasi dan kapitalisme tidak memberikan ekses negatif di dalam seluruh dimensi kehidupan manusia. Untuk memberikan bayangan dan koridor bagi ideal pembangunan, penulis menyertakan paradigma pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, bab V berisikan kesimpulan tulisan ini dan saran yang perlu.